

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan topik yang cukup familiar. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan di negeri ini, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan.

Pembangunan suatu bangsa membutuhkan aspek yang disebut sumber daya baik berupa sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Berbicara tentang sumber daya manusia, tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat digambarkan dalam laporan *Human Development Index* (HDI) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dari *United Nation Development Programme* (UNDP).

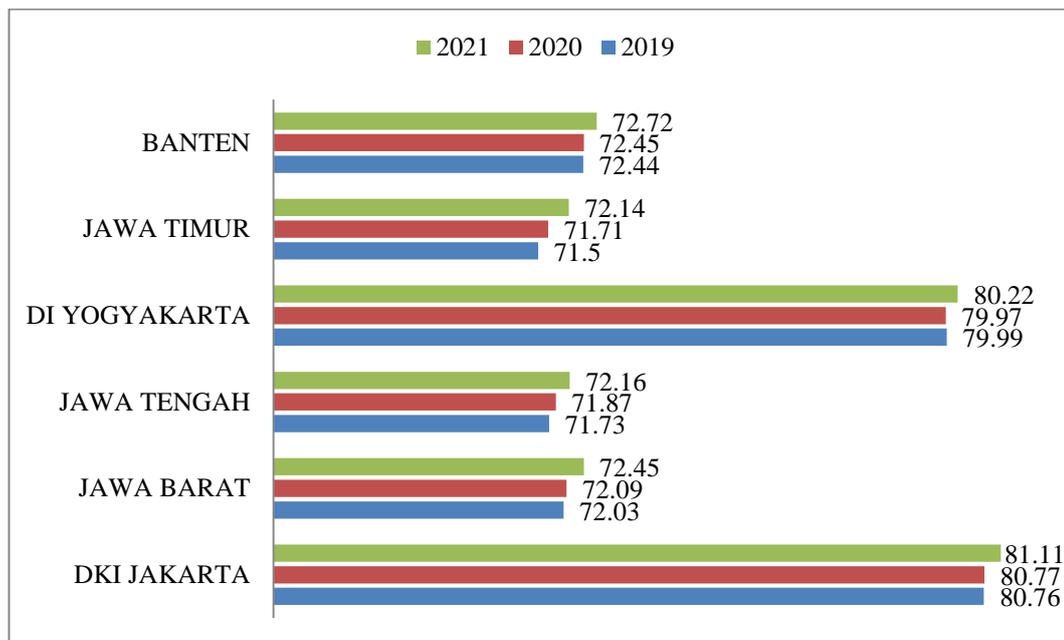
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Secara umum, Jawa Barat merupakan salah provinsi yang memiliki banyak isu krusial terutama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat masih terbelakang rendah di banding 3 Provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Banten. Indeks pembangunan manusia ataupun IPM bisa memastikan peringkat ataupun tingkat pembangunan sesuatu daerah/negeri.

Pada tahun 2021 capaian IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,45% berada pada status tinggi. IPM Provinsi Jawa Barat meningkat 6,30% selama kurun waktu 11 tahun dibanding capaian pada tahun 2010. Dengan demikian IPM Provinsi Jawa Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,83% per tahun. IPM di Jawa Barat pada tahun 2021 persentase tertinggi berada di perkotaan saja dibanding dengan kabupaten dengan melihat kondisi tersebut menjelaskan bahwa fasilitas di perkotaan lebih baik dibanding perkotaan. Sehingga untuk tercapainya tujuan pembangunan manusia, Jawa Barat dihadapkan pada tantangan untuk pemeratakan pembangunan manusia sampai ke seluruh Kabupaten/Kota.

Menurut BPS IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk Indonesia, Indeks pembangunan manusia adalah informasi strategis sebab tidak hanya selaku dimensi kinerja pemerintah, indeks pembangunan manusia pula digunakan selaku salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks pembangunan manusia di Jawa Barat cukup tinggi, namun persentase pengangguran melebihi persentase TPT nasional setiap tahunnya, kemiskinan juga terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir akibat dari adanya pandemi, dan persentase *stunting* masih jauh dari target yang ingin dicapai. Pembangunan Manusia menurut Mazumdar (2011:5) ialah satu fenomena multidimensi dan bergantung kepada satu bilangan aspek-aspek bukan kewenangan dalam kehidupan (indikator-indikator sosial dalam pembangunan).

Menurut Mulyadi S (2014:101) menyatakan bahwa pembangunan manusia ialah konsep relatif dan ia perlu untuk dipahami dari pada satu perspektif antara disiplin. Indeks pembangunan manusia adalah alat pengukur melek huruf, angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara. Indeks pembangunan manusia berguna untuk mengklasifikasi negara apakah masuk ke negara berkembang, negara maju, ataupun negara terbelakang. Indeks pembangunan manusia juga bisa digunakan sebagai pengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

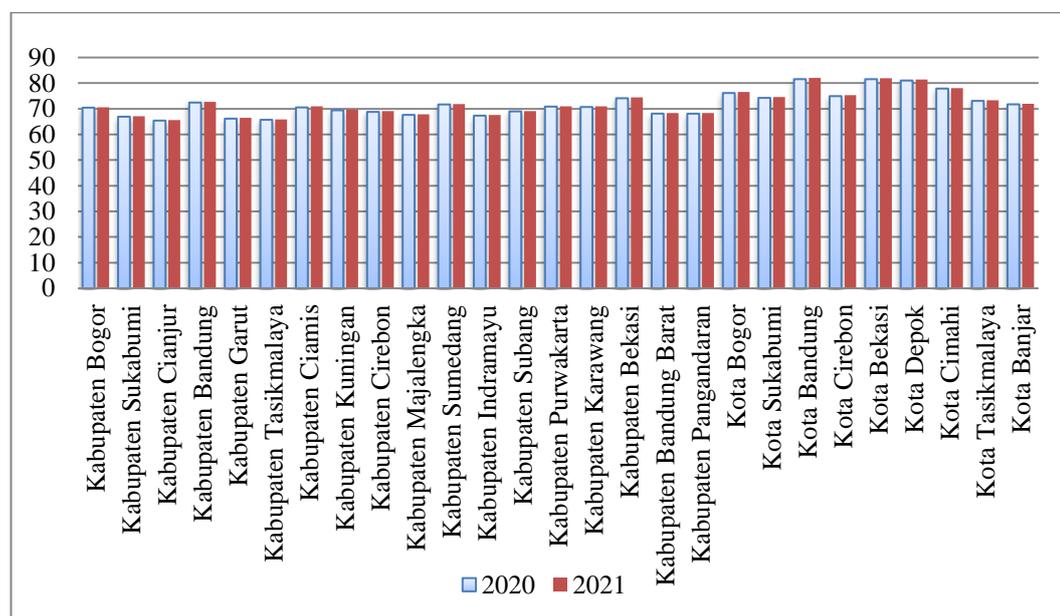
Gambar 1.1

**IPM Provisi di Pulau Jawa Tahun
2019-2021 (Persen)**

Gambar 1.1 menunjukkan indeks pembangunan manusia provinsi di Pulau Jawa selama 3 tahun yaitu dari tahun 2019 sampai 2021 dengan IPM tertinggi tiap tahunnya adalah provinsi DKI Jakarta, dengan diikuti oleh provinsi DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indeks

pembangunan manusia provinsi Jawa Barat berada di urutan ke empat untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa dengan 72,03% pada tahun 2019, 72,09% pada tahun 2020 dan 72,45 persen pada tahun 2021. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa IPM di Pulau Jawa masih belum merata.

Indeks pembangunan manusia di Jawa Barat pada tahun 2021 walau mengalami banyak kendala, Jawa Barat berhasil menorehkan peningkatan persentase yang cukup signifikan. Hal itu terlihat dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Ada kenaikan dari tahun 2020 yang hanya 72,09% menjadi 72,45% pada 2021 meningkat 0,36%. Provinsi Jawa Barat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 menetapkan IPM 73,74% sampai 74,35% yang diproyeksikan dicapai pada tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Gambar 1.2

**IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2021 (Persen)**

Gambar 1.2 menunjukkan grafik indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2021 dengan kenaikan IPM sebesar 0,36% yaitu, dari 72,09% sampai 72,45%. Kenaikan persentase tertinggi kabupaten/kota pada 2 tahun terakhir adalah Kota Bogor dengan 0,48%, sedangkan untuk kabupaten/kota dengan persentase tertinggi 2 tahun terakhir adalah Kota Bandung dengan 81,51% pada tahun 2020 dan 81,96% pada tahun 2021. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat yang bisa mengakses hasil pembangunan seperti halnya Kota Bandung, yang hanya 81,51% pada tahun 2020 dan 81,96% pada tahun 2021 penduduk yang bisa mengakses hasil pembangunan.

Pembangunan manusia di Indonesia khususnya di Jawa Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Capaian pembangunan tertinggi sebgaiian besar berada di perkotaan dibandingkan kabupaten, penyebab ketimpangan ini adalah fasilitas di perkotaan yang lebih mempuni dibanding kabupaten, hal inilah yang harus diperbaiki yaitu pemerataan fasilitas.

Pengangguran merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang menganggur atau menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sehingga tingginya angka pengangguran menimbulkan konsekuensi sosial yang luas karena pengangguran merupakan penyebab utama kemiskinan dan bertambahnya kerentanan sosial. Pada saat yang sama, para penganggur tidak memiliki pendapatan ekonomi, sehingga konsumsinya menurun. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

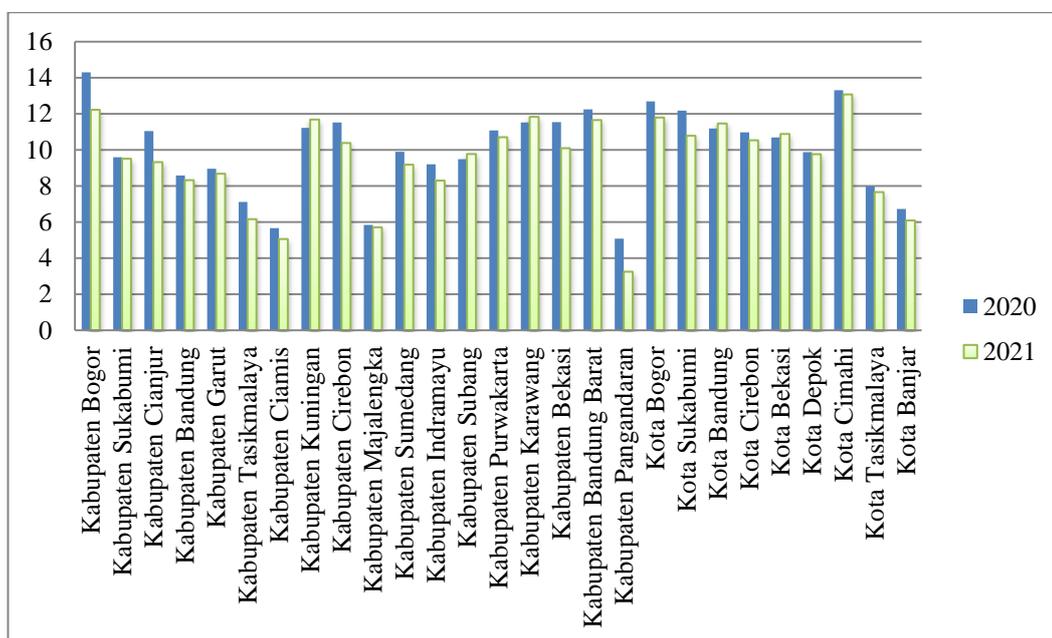
Menurut Sukirno (2010) dalam jurnal (Amgi Filiasari, 2021) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Sedangkan pengangguran terbuka dapat berarti angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Tinggi rendahnya pengangguran di suatu daerah disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja dan kurangnya keterampilan penduduk. Dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang.

Pengangguran adalah kondisi seseorang tidak mampu bekerja hal ini karena adanya beberapa faktor yakni terbatasnya lapangan pekerjaan atau tidak memiliki skill dan tidak memiliki modal untuk membangun usaha karena kualitas manusia tidak membaik. Jika sumber daya manusia berkualitas maka tidak ada pengangguran karena dilihat dari sumber daya manusia yang baik. Menurut Mankiw (2000) dalam jurnal (Yehosua et al., 2019) pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung.

Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi

topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan. Pengangguran yang terjadi akan memiliki dampak terhadap kehidupan sosial yaitu tingkat kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan berkurang.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.3

Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020-2021 (Persen)

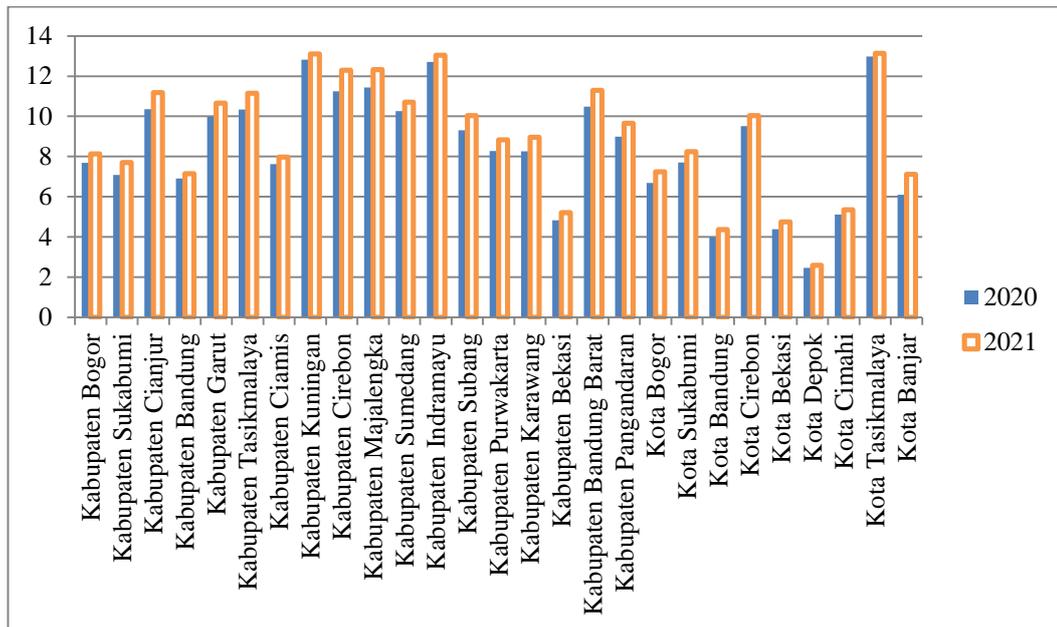
Gambar 1.3 menggambarkan tingkat pengangguran terbuka selama 2 tahun dari tahun 2020 sampai 2021 dimana pengangguran mengalami penurunan hampir di semua kabupaten/kota mengalami penurunan. Kabupaten/kota yang turun secara signifikan adalah Kabupaten Bogor yang turun dari 14,29% menjadi 12,22% turun 2,07%. Turunnya angka pengangguran menunjukkan lapangan

pekerjaan di Jawa Barat membaik, walaupun tidak sepenuhnya pulih akibat pandemi *covid-19*.

Kemiskinan merupakan masalah pemerataan yang belum dapat diselesaikan seperti yang dihadapi Indonesia sendiri, tentunya itu menjadi masalah besar dalam perekonomian. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya alat sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau sulitnya mendapatkan pekerjaan serta pendidikan yang tak layak oleh sebab itu taraf kemiskinan berpengaruh terhadap IPM.

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah pendapatan dan konsumsi, tetapi juga terkait dengan rendahnya pendidikan, kesehatan, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berbagai masalah yang terkait dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan ini diwujudkan dalam kekurangan makanan, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai IPM.

Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997:137). Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.4

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020-2021 (Persen)

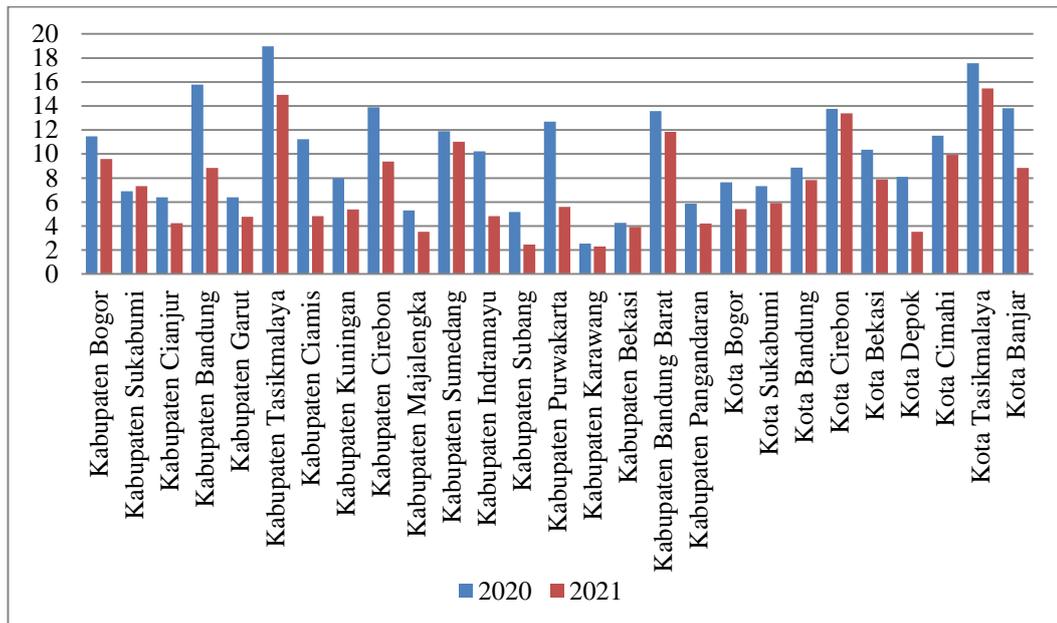
Gambar 1.4 memperlihatkan kondisi kemiskinan di Jawa Barat selama 2 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2021. Terlihat kemiskinan di Jawa Barat setiap kabupaten/kota mengalami kenaikan terutama pada Kabupaten Cirebon yang mengalami peningkatan kemiskinan yang cukup besar yaitu 1,06%. Kenaikan ini diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* dimana semua kegiatan dibatasi yang mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang. Meskipun Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan kemiskinan yang signifikan, Kota Tasikmalaya masih tetap menjadi kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.

Kemiskinan ini masih menjadi permasalahan, penanggulangan kemiskinan merupakan inti tugas pimpinan daerah. Peningkatan persentase kemiskinan ini

menjadi “*warning*” bagi pemerintah, mengingat kemiskinan merupakan faktor penting penyebab terjadinya *stunting* pada balita. Untuk itu, pemerintah harus mengeluarkan aneka kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warganya

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) dalam jurnal (Rahmadhita, 2020) Balita Pendek (*Stunting*) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (*Z-Score*) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/*stunted*) dan <-3 SD (sangat pendek/*severely stunted*). *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Pertumbuhan yang cepat pada masa anak membuat gizi yang memadai menjadi sangat penting. Buruknya gizi selama kehamilan, masa pertumbuhan dan masa awal kehidupan anak dapat menyebabkan anak menjadi *stunting*. Pada 1000 hari pertama kehidupan anak, buruknya gizi memiliki konsekuensi yang permanen (UNICEF, 2013). Masih terdapat beberapa permasalahan di bidang kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya adalah *stunting*. *Stunting* merupakan suatu gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak dimana dikarenakan oleh gizi buruk.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.5

***Stunting* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2021 (Persen)**

Gambar 1.5 memperlihatkan bahwa *stunting* untuk kabupaten/kota selama 2 tahun yaitu tahun 2020 sampai tahun 2021 mayoritas mengalami penurunan yang tinggi terutama Kabupaten Purwakarta yang turun sebesar 7,11%, meskipun turunnya persentase *stunting* di Jawa Barat sangat tinggi masih ada kabupaten/kota yang mengalami peningkatan *stunting* walaupun peningkatan ini hanya sebesar 0,44% yaitu Kabupaten Sukabumi. Tasikmalaya menjadi kabupaten/kota dengan angka persentase *stunting* tertinggi dari tahun 2020 sampai 2021, pada tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya yang paling tinggi di Provinsi Jawa Barat sedangkan 2021 Kota Tasikmalaya yang paling tinggi di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, kemiskinan, dan *stunting* secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2018-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, kemiskinan, dan *stunting* secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hasil:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, kemiskinan, dan *stunting* secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, kemiskinan, dan *stunting* secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pengangguran, kemiskinan dan

stunting terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, sebagai dasar pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan sebagai penerapan ilmu yang selama ini diperoleh dari perkuliahan .

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam upaya pengambilan langkah – langkah yang tepat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya di Provinsi Jawa Barat umumnya di seluruh wilayah Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas dapat dijadikan gambaran mengenai indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi jawa barat.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Mengacu pada judul penelitian yang diajukan maka penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di provinsi jawa barat, yang diperoleh dari sumber BPS dan open data jabar.

